



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS ANDALAS
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS KEDOKTERAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIRSMA ARIF HARAHAP**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **692477**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 12.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 31.42 m2/27.2 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 795.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA CB 500 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



125.000.000

5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000

6. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 154.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 300.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 13.649.000.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 13.649.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Desember 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.